



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 58 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENETAPAN KUALIFIKASI TERHADAP 265 PENYELENGGARA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu melakukan penilaian dan penetapan kualifikasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Kualifikasi Terhadap 265 (dua ratus enam puluh lima) Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan Kota Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN KUALIFIKASI TERHADAP 265 PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2011.**
- PERTAMA** : Menetapkan kualifikasi penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal tahun 2011, merujuk kepada ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- KEDUA** : Penetapan Kualifikasi terhadap 265 (dua ratus enam puluh lima) Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal Kabupaten dan Kota Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN KUALIFIKASI TERHADAP 265 PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2011.**

PERTAMA : Menetapkan kualifikasi penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal tahun 2011, merujuk kepada ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

KEDUA : Penetapan Kualifikasi terhadap 265 (dua ratus enam puluh lima) Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal Kabupaten dan Kota Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 11 Oktober 2011



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

GITA BAWAN WIRJAWAN

Tembusan Yang Terhormat:

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri;
3. Bapak Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Bapak Menteri Keuangan;
5. Ibu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Bapak Menteri Perindustrian;
7. Ibu Menteri Perdagangan;
8. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bapak Menteri Pertanian;
10. Bapak Menteri Kehutanan;
11. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Ibu Menteri Kesehatan;
13. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Bapak Menteri Pendidikan Nasional;
15. Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
16. Bapak Menteri Perhubungan;
17. Bapak Menteri Hukum dan HAM;
18. Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
19. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat;
20. Bapak Kepolisian Republik Indonesia;
21. Gubernur Seluruh Indonesia;
22. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
23. Kepala PDPPM Seluruh Indonesia;
24. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal Provinsi
Seluruh Indonesia;
25. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia;
26. Kepala Instansi PDKPM Seluruh Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


GITA IRAWAN WIRJAWAN

Tembusan Yang Terhormat:

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri;
3. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Bapak Menteri Keuangan;
5. Ibu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Bapak Menteri Perindustrian;
7. Ibu Menteri Perdagangan;
8. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bapak Menteri Pertanian;
10. Bapak Menteri Kehutanan;
11. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Ibu Menteri Kesehatan;
13. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Bapak Menteri Pendidikan Nasional;
15. Bapak Menteri Pekerjaan Umum;
16. Bapak Menteri Perhubungan;
17. Bapak Menteri Hukum dan HAM;
18. Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
19. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat;
20. Bapak Kepolisian Republik Indonesia;
21. Gubernur Seluruh Indonesia;
22. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
23. Kepala PDPPM Seluruh Indonesia;
24. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal Provinsi
Seluruh Indonesia;
25. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia;
26. Kepala Instansi PDKPM Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BKPM

NOMOR : 58 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Oktober 2011

**Penetapan Kualifikasi Terhadap 265 Penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Kabupaten dan Kota Tahun 2011**

A. Kabupaten**1. Kualifikasi Bintang Dua**

No.	Kabupaten	Provinsi	Nama PTSP Bidang Penanaman Modal	Alamat
1.	Kabupaten Rokan Hulu	Riau	BADAN PELAYANAN TERPADU PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Bina Praja Pemkab, Rokanhulu
2.	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	Jl.Raya Riante Km 5,5 Pangururan
3.	Kabupaten Pontianak	Kalimantan Barat	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Jalan Daeng Menambon Mempawah
4.	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN	Jl. Raya Dringu No. 45, Probolinggo
5.	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl.Ki Hajar Dewantara No.29 Simpang empat Kab.Pasaman Barat
6.	Kabupaten Muko Muko	Bengkulu	KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Komplek Pemda Kabupaten Muko - Muko
7.	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. A. Yani KM. 39.9 64 A Martapura - Kab. Banjar 70611
8.	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Komplek Perkantoran Pemerintah Kab.Bekasi Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat

9.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jln. D.I. Panjaitan Km 6.5 No. 32 Tanjung Pinang
10.	Kabupaten Bireuen	Aceh	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Jl. Medan-Banda Aceh No. 2, Cok Gapu
11.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	BADAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
12.	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	KANTOR PELAYANAN TERPADU	Jln. Beringin I No. 57 Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto
13.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grogoban Jawa Tengah
14.	Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	jl. lintas timur pematang reba - rengat - indragiri hulu
15.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jln. Veteran no. 22 Kebumen Jawa Tengah
16.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN	Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan
17.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Jl. Letjend Yusuf Singadekane No. 1 Muara Baru, Kayuagung
18.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	Jl. Gatot Subroto No. 73
19.	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	jl. M. Syafei No. 10, Pariaman

20.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Kyai Mawardi no. 1, Sukoharjo, Jawa Tengah
-----	---------------------	-------------	------------------------------------	--

2. Kualifikasi Bintang Satu

No.	Kabupaten	Provinsi	Nama PTSP Bidang Penanaman Modal	Alamat
1.	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Jl. Veteran No.1 Padang baru Lubuk Basung Agam Sumatera Barat
2.	Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Kartini No. 03 Takengon
3.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	BADAN PENGELOLA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5, Kisaran, Kabupaten Asahan.
4.	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Jend. A. Yani No.3 Paringin
5.	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN	Komp. Pemda Kab. Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Jl. Kartini No. 4 Soreang 40911 Kab. Bandung
6.	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Kartini No. 4
7.	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	BADAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Bukit Indah No. 2, Pangkalan Balai
8.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	Jl. Andi Iskandar Unru No.4, Kec. Barru Kabupaten Barru
9.	Kabupaten Bengkalis	Riau	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jln. Antara Bengkalis
10.	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Chairil Anwar No. 279

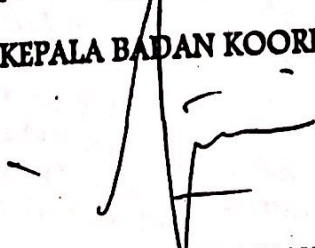
23.	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl Raden Intan No.2 Kalianda Lampung Selatan
24.	Kabupaten Lebak	Banten	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Abdi Negara No.3 Rangkasbitung 42312 Kabupaten Lebak - Propinsi Banten
25.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh
26.	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kab. Luwu Timur
27.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Aloon-Aloon Utara No. 4, Madiun
28.	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	jl. lintas kota baru km-2 nanga pinoh
29.	Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Kompleks Kantor Bupati Minahasa
30.	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	jl.Kemayoran no.09.kel pasar I kec.M.Enim
31.	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl.Kol.Wahid Udin LK II Sekayu.
32.	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN	Jl.Lintas Sumatera komplek perkantoran,Pemkab Musi Rawas Muara Beliti
33.	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Tombronegoro No.1 Pati Jawa Tengah
34.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Jend. Sudirman No. 187 Pinrang

11.	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Desa Ulanta Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango
12.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	KANTOR PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	Jl. Kates No. 51, Boyolali, Jawa Tengah
13.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Sunan Muria No.10 Sumber Kabupaten Cirebon
14.	Kabupaten Gianyar	Bali	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Ngurah Rai No. 5-7
15.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Ganesya No.01 Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
16.	Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	Jln. Hangtuah No.4 Tembilahan Gd. Inhil Busenes Centre Lt.1
17.	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Kartini No. 1 Jepara Jawa Tengah
18.	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Tambun Bungai No. 39 Kuala Kapuas
19.	Kabupaten Karangasem	Bali	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jalan Gajah Mada, Kabupaten Karangasem
20.	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Soekarno Hatta No. 14, Kediri
21.	Kabupaten Keerom	Papua	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	Jln. Garuda Arso II Kab. Keerom
22.	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH	Jalan Kolonel H. Barlian-Talang Kapuk, Kabupaten Lahat, Prov. Sumatera Selatan

14.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP SEKRETARIAT DAERAH	Jl.Jend.Sudirman no 34 Prabumulih
15.	Kota Probolinggo	Jawa Timur	BADAN PELAYANAN PERIZINAN	Jl.Basuki Rahmad 44 Probolinggo
16.	Kota Solok	Sumatera Barat	KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN	Jl.Lubuk Sikarah No.89, Solok, Sumatera Barat 27314
17.	Kota Subulussalam	Aceh	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Jl. Syech Hamzah Fansuri No. 32, Subulussalam 24782
18.	Kota Sungai Penuh	Jambi	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : KOTA SUNGAI PENUH	Jl.Sukarno-Hatta No.22 Desa Pelayang Raya, Sungai Penuh
19.	Kota Tangerang Selatan	Banten	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl.Raya Serpong KM.12 Komplek BLK Serpong Kota Tangerang Selatan 15323, Banten
20.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya
21.	Kota Ternate	Maluku Utara	UNIT PELAYANAN SATU ATAP	Jln. Yos Sudarso Kota Ternate
22.	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Jl. Raya Tomohon Kakaskasen III, Kec. Tomohon Utara

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


GITA IRAWAN WIRJAWAN